

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini secara keseluruhan menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana narasi represi intelektual terhadap awardee LPDP dikonstruksi secara digital dalam kanal YouTube Tempo.co Bocor Alus Politik episode "Gaduh LPDP, Penerima Beasiswa Dilarang Mengkritik Pemerintah". Berdasarkan observasi deskriptif dan analisis wacana digital yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tayangan tersebut beroperasi sebagai wacana tandingan (counter-discourse) yang secara sistematis membongkar mekanisme pendisiplinan birokrasi negara terhadap otonomi kaum terpelajar. Konstruksi ini terlihat jelas pada elemen teks, di mana wacana dibangun melalui strategi multimodal seperti metafora visual pembungkaman akademisi pada thumbnail, serta tuturan yang mendekonstruksi narasi "balas budi" dan "uang pajak rakyat" sebuah narasi yang selama ini direproduksi otoritas sebagai alat rasionalitas pemerintahan (governmentality) untuk mengubah fasilitas pendidikan menjadi instrumen penuntut konformitas politik dan kepatuhan struktural.

Secara kontekstual, produksi wacana ini lahir sebagai respons terhadap polemik pelanggaran kontrak administratif dan stigmatisasi digital terhadap cendekiawan kritis. Dalam kondisi ini, kanal YouTube Tempo.co menggunakan legitimasi institusionalnya untuk menyediakan ruang publik alternatif (*alternative public sphere*), memediasi redefinisi makna "pengabdian" bagi seorang penerima beasiswa menggesernya dari batasan kepatuhan hierarkis dan administratif menjadi

wujud tanggung jawab intelektual melalui pemberian kritik rasional terhadap kebijakan publik. Hal ini menegaskan bahwa posisi media sangat krusial dalam memberikan perlindungan diskursif bagi akademisi yang mengalami tekanan birokrasi.

Pada tataran tindakan dan interaksi, kolom komentar YouTube memfasilitasi tindakan termediasi (*mediated action*) dari audiens yang terpolarisasi secara diskursif. Interaksi yang pro secara aktif mendukung wacana otonomi dengan mendekonstruksi stigma "pembangkang" dan menegaskan bahwa kritik adalah wujud kepedulian yang sah secara demokrasi konstitusional, sementara interaksi yang kontra justru mereproduksi narasi hegemonik dengan menuntut kepatuhan mutlak dan mendesak penerapan sanksi finansial bagi penerima beasiswa. Dinamika ini mengonfirmasi bahwa pengawasan siber (*Digital Panopticon*) tidak hanya terjadi secara vertikal oleh otoritas pemegang kekuasaan, tetapi juga beroperasi secara horizontal melalui warganet yang bertindak sebagai agen pendisiplinan sosial terhadap sesamanya.

Pada akhirnya, penelitian ini menemukan adanya benturan ideologis yang tajam antara negara yang menuntut kepatuhan melalui instrumen administratif, berhadapan dengan ideologi kebebasan akademik. Pengawasan digital yang konstan menghasilkan relasi kuasa asimetris yang memaksa kaum terpelajar untuk melakukan penyensoran diri (*self-censorship*) guna mengamankan status pendanaan mereka. Meskipun demikian, pemanfaatan platform YouTube oleh institusi media dan partisipasi aktif masyarakat sipil membuktikan bahwa hegemoni tersebut dapat dilawan medium digital memberikan ruang kontestasi yang krusial

bagi kelompok intelektual untuk menegaskan kembali hak kebebasan berpendapatnya di tengah ancaman represi birokrasi. Dengan demikian, rumusan masalah penelitian ini terjawab secara komprehensif melalui keempat elemen wacana digital tersebut, yang secara bersama-sama menggambarkan bagaimana represi intelektual dikonstruksi, dinegosiasikan, sekaligus dilawan dalam ruang publik siber.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan baik secara akademis maupun praktis.

5.2.1 Saran Akademis

Bagi ranah akademis, penelitian ini memberikan ruang bagi eksplorasi lebih lanjut terkait kajian wacana digital dan kebebasan akademik. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek material penelitian, tidak hanya berfokus pada platform berbasis video seperti YouTube, melainkan juga merambah pada platform berbasis teks dengan interaksi cepat seperti X (Twitter). Langkah ini penting guna melihat pola penyebaran wacana dan polarisasi opini publik secara seketika (*real-time*).

Selain itu, diperlukan pula penelitian lanjutan yang menggunakan pendekatan berbeda, seperti etnografi virtual maupun fenomenologi. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menggali secara langsung dan mendalam mengenai pengalaman psikologis para penerima beasiswa, khususnya terkait intensitas dan mekanisme penyensoran diri (*self-censorship*) yang mereka lakukan selama masa studi sebagai dampak dari pengawasan siber.

5.2.2 Saran Praktis

Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah dan LPDP mengevaluasi pedoman etik serta regulasi administratif sehingga dapat mendukung kebebasan akademik tanpa mengabaikan kewajiban administratif penerima beasiswa. Bagi awardee LPDP, penelitian ini mendorong peningkatan literasi digital dan pemahaman mengenai hak kebebasan akademik agar tetap mampu bersikap kritis secara bertanggung jawab. Sementara itu, media dan jurnalis digital diharapkan terus menjalankan perannya sebagai ruang publik alternatif yang mendukung kontrol sosial dan menyajikan narasi kritis terhadap kebijakan publik.